

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai tindak lanjut Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016 – 2021.

Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan pertanggung jawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan kebijakan yang telah digariskan oleh pusat dan kebijaksanaan operasional di daerah dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Batam di bidang pertanahan.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Batam tersebut selanjutnya dituangkan melalui Rencana Kerja (Renja) tahunan, penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan dalam melaksanakan Otonomi Daerah di bidang pertanahan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam, khususnya menjadi pedoman ataupun acuan bagi pejabat struktural dan seluruh staf dalam mendukung terwujudnya Visi Kota Batam menuju *Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat.*

Batam, Februari 2021

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM,**



NURZALIE, AP. S.Sos

Pembina Utama Muda
NIP. 19730206 199311 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2020 ini dibuat sebagai Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 dalam upaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*). LKjIP ini berisikan informasi tentang pencapaian kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam yang mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 merupakan rencana jangka menengah untuk jangka waktu tahun 2016 sampai dengan 2021 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam. Sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi LKjIP tahun sebelumnya, telah kami lakukan perubahan terhadap Rencana Strategis Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021. Dalam rencana strategis tersebut, pada tahun 2020 Dinas Pertanahan Kota Batam terdapat 2 sasaran, 3 program dan 5 kegiatan yang harus dicapai/dilaksanakan dengan dukungan dana dari APBD/APBDP Kota Batam sebesar Rp 2.175.093.771,74,00 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma tujuh empat), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 628.392.163,00 atau 28,89%,- dan realisasi fisik sebesar 47,63%.

Dari sasaran yang harus dicapai tersebut, capaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas.

Pada sasaran pertama, indikator kinerja sasaran yang akan dicapai adalah:

- a. Cakupan pelayanan administrasi perkantoran, berupa tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi PD

Kota Batam dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja telah tercapai dengan tingkat capaian 100,00%.

- b. Cakupan sarana dan prasarana aparatur, berupa meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi PD Kota Batam dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja telah tercapai dengan tingkat capaian 100,00%.
2. Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik
- Pada sasaran kedua, indikator kinerja program yang akan dicapai adalah:
- a. Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja telah tercapai dengan tingkat capaian 100,00%.
 - b. Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal dan berdasarkan hasil pengukuran kinerja tidak tercapai dengan tingkat capaian 63,28%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Data Umum Organisasi	1
1.2. Aspek Strategis Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Rencana Strategis Organisasi	6
2.1.1 Visi	7
2.1.2 Misi	9
2.1.3 Tujuan	10
2.1.4 Sasaran	10
2.1.5 Arah Kebijakan	11
2.2. Rencana Kinerja (Perjanjian Kinerja)	12
2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja	13
2.2.2 Program dan Kegiatan	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD	23
3.2. Analisis Capaian Kinerja	25
3.3. Akuntabilitas Keuangan	47
BAB IV PENUTUP	50

1.1 DATA UMUM ORGANISASI

Seiring dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diserahkannya beberapa kewenangan pusat kedaerah melalui Kepres No 34 tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan, maka Pemerintah Kota Batam membentuk Dinas Pertanahan Kota Batam yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota.

Pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pertanahan Kota Batam berpedoman kepada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 yang dalam pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah, serta Peraturan Walikota Batam Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pertanahan.

Dinas Pertanahan Kota Batam mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pertanahan daerah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Untuk penyelenggaraan tugasnya, Dinas Pertanahan Kota Batam menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pertanahan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanahan.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan.
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanahan.

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, Dinas Pertanahan Kota Batam berpedoman pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 (yang telah dilakukan evaluasi dan revisi/perubahan setiap tahun) dan Rencana Kerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 yang disusun pada bulan Januari 2020 dan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 yang disusun pada bulan September 2020.

1.2 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dinas Pertanahan Kota Batam menyadari betapa beratnya tantangan dan hambatan yang harus dihadapi di masa sekarang maupun yang akan datang. Dengan belum sepenuhnya pemberian kewenangan dan urusan di Bidang Pertanahan yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan masih eksisnya Kepres Nomor 41 tahun 1973, Kepmendagri Nomor 43 tahun 1977 yang berisi pengelolaan dan pengaturan tanah di Pulau Batam dan pulau-pulau di sekitarnya yang masih berada dalam pengaturan dan pengelolaan Badan Otorita Batam, Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam, Peraturan Presiden No 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam serta belum adanya Peraturan Daerah tentang Pertanahan, oleh karena itu eksistensi Dinas Pertanahan belum dapat berfungsi secara optimal.

Dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1) huruf k disebutkan bahwa urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota antara lain adalah *Pelayanan Pertanahan*. Dan hal ini menjadi tugas yang harus diemban oleh Dinas Pertanahan Kota Batam selaku instansi yang bertanggung jawab di bidang pertanahan dalam struktur organisasi Pemerintahan Kota Batam.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penjelasan Huruf J, Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan, urusan pemerintahan di bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

- a. Pemberian ijin lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota;
- b. Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota;
- c. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
- d. Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah Kabupaten / Kota;
- e. Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah Kabupaten / Kota;
- f. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah Kabupaten / Kota serta Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah Kabupaten / Kota;
- g. Penerbitan izin membuka tanah;
- h. Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah Kabupaten / Kota.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

1.3.1 Organisasi Dinas

Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Batam Nomor 28 Tahun 2016 tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas daerah, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanahan Kota Batam terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Program dan Keuangan;
- b. Bidang Penatagunaan dan Pendayagunaan Pertanahan, membawahi:
 - 1. Seksi Penatagunaan Tanah;
 - 2. Seksi Pendayagunaan Tanah;
 - 3. Seksi Penataan Kawasan Tertentu.
- c. Bidang Pemanfaatan dan Pengadaan Pertanahan, membawahi:
 - 1. Seksi Pemanfaatan Tanah;
 - 2. Seksi Pengadaan Tanah;
 - 3. Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan Tanah.
- d. Bidang Pengawasan Pertanahan dan Penanganan Masalah Pertanahan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Pertanahan;
 - 2. Seksi Penanganan Masalah Pertanahan;
 - 3. Seksi Data dan Informasi Pertanahan.

1.3.2 Keadaan Pegawai

Dalam rangka meningkatkan kinerja, Dinas Pertanahan Kota Batam didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 29 orang yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, tingkat pendidikan dan status kepegawaian, dengan komposisi dan rincian pegawai sebagai berikut :

- a. Pendidikan Pegawai

No.	Jenjang Pendidikan	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	S2	Ilmu Manajemen	4
		Ilmu Perencanaan Wilayah	1
		Ilmu Hukum	1
2	S1	Teknik	3
		Ekonomi	8
		Sosial Politik	2
		Komputer	2
		Hukum	2
3	SMA		6
	Jumlah		29

b. Status Kepegawaian

No.	Jenjang Pendidikan	PNS	Honorar	Jumlah
1	S2	4	-	4
2	S1	19	-	19
3	SLTA	5	1	6
	Jumlah	28	1	29

2.1 RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penyusunan rencana strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Analisis terhadap lingkungan organisasi merupakan dasar bagi perwujudan visi, misi serta kebijakan dan strategi Dinas Pertanahan Kota Batam.

Potensi, peluang dan tantangan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perangkat daerah dalam mengemban misinya. Peluang yang cukup mendukung antara lain adanya kemajuan teknologi, dukungan masyarakat, adanya pola kemitraan dan lain sebagainya. Adapun yang menjadi kendala/tantangan dalam penanganan masalah bidang pengelolaan pertanahan hampir sama dengan bidang-bidang lain, antara lain jumlah sumber daya manusia yang ada masih minim, pengetahuan masyarakat yang masih kurang, letak geografis, perangkat hukum, perundang-undangan yang belum sempurna, anggaran yang terbatas, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Rencana strategis yang dimaksud disini merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan

berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses inilah yang akan menghasilkan rencana strategi instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya. Dan dalam upaya percepatan pencapaian tujuan sasaran pada Dinas Pertanahan Kota Batam pada tahun 2020 berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021.

2.1.1 Visi

Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2016–2021:

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”

Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut :

Batam : Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Batam dan seluruh warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak 1970 hingga sekarang.

Bandar Dunia : Mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "*center of excellences*", dengan melakukan pendalaman pada fungsi-

fungsi yang sudah ada yang ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.

Madani : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (*civilized*). Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai permasalahan.

Berdaya Saing : Mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.

Maju : Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.

Sejahtera : Bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin. Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan kesejahteraan antar generasi.

Bermartabat : Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparatur pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan status

2.1.2 Misi

Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2016-2021, dirumuskan 6 (enam) pernyataan misi sebagai berikut:

1. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan, Akuntabel dan Mengayomi.
2. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Daerah yang Bertaqwa, Berdaya Saing dan Masyarakat Sejahtera.
3. Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan, Infrastruktur Kota yang Modern, serta Penataan Permukiman yang Ramah, Asri dan Nyaman sesuai Nilai Budaya Bangsa.
4. Mewujudkan Penguatan Sektor Industri dan Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alihkapal, Maritim dan Pertanian/Perikanan dalam Menopang Perekonomian Daerah.
5. Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang Bersinergi dengan Kebutuhan Industri dan Pasar Domestik.
6. Percepatan Pembangunan Wilayah Hinterland sebagai Penopang Perekonomian Kota Batam.

Untuk Dinas Pertanahan Kota Batam sendiri misi yang paling berkaitan adalah misi 3 (tiga), yaitu *Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan, Infrastruktur Kota yang Modern, serta Penataan Pemukiman yang Ramah, Asri dan Nyaman sesuai Nilai Budaya Bangsa*

2.1.3 Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan merumuskan dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk mencapai visi dan misi. Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari pernyataan misi dan merupakan hasil yang ingin dicapai.

Tujuan yang akan dicapai ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik serta kemampuan sumberdaya organisasi yang tersedia maupun perlu dikembangkan selama kurun renstra Dinas Pertanahan Kota Batam yaitu antara tahun 2016-2021. Ketersediaan tujuan ini akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Untuk mencapai Visi dan Misi tersebut maka telah dirumuskan tujuan Pemerintah Kota Batam periode tahun 2016 – 2021. Adapun tujuan yang harus dicapai Dinas Pertanahan Kota Batam adalah *Terwujudnya Kualitas Pengelolaan Pertanahan Kota Batam.*

2.1.4 Sasaran

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula

indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran secara kuantitatif untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran yang telah dirumuskan Dinas Pertanahan periode tahun 2016-2021 adalah (1) terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas, dan (2) meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan lahan aset untuk kepentingan pemko Batam dalam meningkatkan pelayanan publik

2.1.5 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati oleh pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan dan petunjuk bagi setiap aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Pertanahan Kota Batam.

Dalam rangka menunjang kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai Visi dan misi dibuat kebijakan berupa pedoman atau petunjuk yang terdiri dari :

- 1) **Kebijakan Teknis**, Kebijakan Teknis / operasional yang berkaitan dengan kegiatan pertanahan meliputi (1) melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi, (2) melakukan pendataan secara menyeluruh lokasi, luasan dan kondisi eksisting aset tanah Pemko Batam,

pengadaan tanah dan dokumen tanah untuk kepentingan pelayanan publik pemerintah kota batam, serta (3) melakukan koordinasi dan pendataan penggunaan dan peruntukan tanah, serta memberikan pertimbangan dan rekomendasi terkait perijinan pemanfaatan tanah.

- 2) ***Kebijakan Personalia***, Kebijakan personalia diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang pertanahan yang profesional, terampil serta mempunyai sikap mental yang baik, hal tersebut dapat dilakukan melalui strategi kebijakan antara lain: pemilihan tenaga-tenaga yang sesuai dengan bidang tugas pertanahan, melakukan pelatihan teknis operasional, melakukan pelayanan administrasi kepegawaian secara cepat dan tepat (kenaikan pangkat, gaji berkala, DUK dan lain-lain) sehingga mampu menjadi sumber motivasi bagi peningkatan kinerja pegawai serta melakukan pembinaan sikap mental secara terus menerus.
- 3) ***Kebijakan Keuangan***, Faktor anggaran sangat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran, oleh karenanya kebijakan di bidang keuangan sangat diperlukan. Strategi yang akan diterapkan dalam hal ini yaitu pemberdayaan terhadap kekuatan masyarakat, kerjasama dengan lembaga keuangan dan mencari terobosan lain seperti kerjasama dengan investor. Selain itu melakukan penyusunan rencana kegiatan sebagai bahan usulan untuk kegiatan rutin dan pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam yang akan dijadikan bahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam.

2.2 RENCANA KINERJA (PERJANJIAN KINERJA)

Rencana kinerja pada hakekatnya merupakan implementasi dari visi dan misi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada

Dinas Pertanahan Kota Batam, untuk mendukung visi dan misi tersebut maka ditetapkan sasaran dan indikator kinerja yang didukung dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja

Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut maka telah dijabarkan dalam sasaran secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja pada dokumen Penetapan Kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020, yang kemudian berdasarkan kebutuhan dan dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah Kota Batam telah dilakukan reviu dan ditetapkan pada dokumen Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020.

Sasaran pembangunan Dinas Pertanahan Daerah Kota Batam serta indikator kinerja yang menjadi target kinerja pada tahun 2020, sebagaimana pernyataan perjanjian kinerja (perubahan) Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2020 dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Indikator Program	Satuan	Target
Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100,00
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persen	100,00
	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset tanah pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan lahan aset untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persen	72,00
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persen	75,66

Indikator kinerja berupa persentase ketersediaan lahan yang menjadi aset pemerintah Kota Batam, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 100%, dengan kondisi akhir periode Renstra tahun 2016-2021 diharapkan tersedianya lahan aset pemko Batam sebanyak 50 persil. Rumus indikator sasaran program adalah *(jumlah lahan tersedia/ jumlah kebutuhan lahan aset pemko Batam) x 100%*.

Target capaian Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam yang mengacu pada target sasaran RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam adalah 444 persil lahan aset, dimana rencana pengalokasiannya untuk pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dalam rangka mendukung rencana pemekaran kecamatan dan kelurahan di wilayah Pemerintahan Kota Batam yang rencananya akan dimulai pada tahun 2018. Namun seiring dengan belum terealisasinya pemekaran kecamatan dan kelurahan dimaksud, maka Dinas Pertanahan Kota Batam telah melakukan reviu dan perubahan terhadap target Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam, yang disesuaikan dengan perkiraan kebutuhan pemerintah Kota Batam dari 444 persil menjadi 50 persil untuk periode tahun 2016-2021.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 adalah sebesar 72,00%, yaitu 36 persil aset tanah dari target kebutuhan 50 persil aset tanah.

Indikator kinerja berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang berstatus legal, selama periode tahun 2016 sampai dengan 2021 ditargetkan sebesar 75,66% (855 dokumen), dengan

kondisi akhir tahun 2021 diharapkan terlaksananya sertifikasi lahan aset Pemko Batam sebanyak 455 dokumen dari 630 persil/bidang aset tanah yang ada, dan terlaksananya sertifikasi tanah masyarakat sebanyak 500 dokumen dari target 500 persil/bidang aset tanah masyarakat. Rumus indikator sasaran program adalah *(jumlah lahan yang disertifikasi / target lahan yang akan disertifikasi) X 100%*.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 adalah 47,88% (541 dokumen) dari target 75,66% (855 dokumen), yang terdiri dari 252 dokumen sertifikat lahan aset pemko dan 289 dokumen sertifikat lahan masyarakat. Proyeksi sampai dengan tahun 2021 adalah 75,66%, yaitu 455 dokumen sertifikat dari target 630 dokumen sertifikat lahan aset dan 400 dokumen sertifikat dari target 500 dokumen sertifikat lahan masyarakat.

Untuk mendukung pencapaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam diatas, telah ditetapkan target capaian kinerja di tingkat bidang dan seksi di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan seksi di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam yang dituangkan dalam dokumen pernyataan perjanjian kinerja (terlampir).

2.2.2 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program yang dilakukan sangat erat kaitannya dengan kebijakan yang dirumuskan.

Program pembangunan bidang pertanahan tahun 2020 direncanakan pelaksanaannya dan pembiayaannya melalui APBD/APBDP Kota Batam dengan mengacu pada sasaran rencana kerja tahun 2020.

Adapun program pembangunan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2020 yang pembiayaannya melalui APBD/APBDP Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Tanah

Melalui Program Tata Guna Tanah diharapkan terjadi peningkatan penataan tata guna tanah di Kota Batam.

2. Program Pendukung

Program pendukung di Dinas Pertanahan Kota Batam meliputi 2 (dua) program sebagai berikut:

- Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dalam hal ini 1 (satu) tahun yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Sedangkan indikator kinerja kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Kegiatan SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2020 pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD/APBDP Kota Batam.

Jumlah anggaran belanja langsung kegiatan SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam dengan sumber dana APBD tahun 2020 adalah sebesar Rp. 1.037.983.107,48 (satu milyar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus

delapan puluh tiga ribu seratus tujuh rupiah koma empat delapan sen). Kemudian melalui mekanisme Anggaran Perubahan (APBD Perubahan) pada bulan September 2020, maka terjadi penambahan anggaran menjadi Rp. 2.175.093.771,74 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta Sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma tujuh empat sen).

Adapun kegiatan dan indikator kinerja kegiatan SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2020 yang pelaksanaan dan pembiayaannya bersumber dari dana APBD/APBDP Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Program Penataan Tata Guna Tanah

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang telah dilaksanakan mulai tahun 2017. Hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan dokumen lahan aset Pemko Batam sampai dengan tahun 2020 adalah 252 dokumen dari 630 aset tanah Pemko Batam (40,00%).

Rincian kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah tahun 2020 pada DPPA tahun 2020 sebagai berikut :

Input : Rp. 652.902.800,-
Output : Jumlah dokumen sertifikat lahan aset Pemerintah Kota Batam 247 dokumen
Outcome : Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan

- masyarakat yang berstatus legal 75,66%
- Benefit : Tersedia data-data tanah yang memudahkan dalam perencanaan pembangunan
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan

b. Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat

Kegiatan ini merupakan usulan masyarakat di forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan Kota Batam.

Kegiatan pengurusan sertifikasi lahan masyarakat dilakukan dengan bekerjasama dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batam, dan satuan pembiayaan disesuaikan dengan SHB yang diterbitkan oleh BPN RI dan SHB Pemerintah Kota Batam.

Rincian kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat tahun 2020 berdasarkan DPPA tahun 2020 sebagai berikut :

- Input : Rp. 652.100.000,-
- Output : Jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat 1.243 dokumen.
- Outcome : Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal 75,66%.
- Benefit : Tertib administrasi pertanahan.
- Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan.

c. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Melalui kegiatan penataan lahan kampung tua ini diharapkan terlaksananya penyelesaian pengukuran batas kampung tua Kota

Batam dengan kawasan hutan, serta mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat kampung tua dalam mengakses sarana dan prasarana yang memadai, serta lebih jauh diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kampung tua.

Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua pada tahun 2020 merupakan usulan tim GTRA Kota Batam pada Forum Rapat koordinasi GTRA Kota Batam tahun 2020, yang diusulkan melalui APBD Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020.

Rangkaian kegiatan penataan lahan kampung tua pada tahun 2020 adalah Penataan Tata Batas Kampung Tua dengan Kawasan Hutan Negara, meliputi: 1) Inventarisasi Trayek Batas Kawasan Hutan, 2) Pemancangan Batas Sementara dan Identifikasi Hak-Hak Pihak Ketiga, dan 3) Pemasangan dan Pengukuran Tanda Batas Kawasan Hutan, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang.

Rincian kegiatan penataan tanah kampung tua tahun 2020 berdasarkan DPPA tahun 2020 sebagai berikut :

Input : Rp. 331.114.200,-

Output : Penyelesaian tata batas kampung tua kota batam dengan kawasan hutan negara 100,00%.

Outcome : Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal 75,66%.

Benefit : Tertib administrasi pertanahan.

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan pembangunan.

2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

a. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja bahan/peralatan pakai habis, belanja bahan dan material, belanja jasa kantor, belanja cetak, penggandaan dan dokumendasi, belanja perjalanan dinas, belanja pajak, retribusi dan iuran lainnya.

Rincian kegiatan berdasarkan DPPA tahun 2020 sebagai berikut :

Input : Rp. 501.110.743,-

Output : Tersedianya sarana administrasi perkantoran.

Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.

Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Impact : Meningkatnya kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintah

Kegiatan yang direncanakan pada program ini:

b. Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang dahulunya termasuk dalam anggaran Belanja Administrasi Umum (BAU) dimana terdiri dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, belanja pemeliharaan gedung.

Rincian kegiatan berdasarkan DPPA tahun 2020 sebagai berikut :

Input : Rp. 37.866.028,74

Output : Tersedianya sarana dan prasarana aparatur

- Outcome : Meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
- Benefit : Memudahkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.
- Impact : Menciptakan suasana kerja yang aman dan nyaman.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran.

Kerangka pengukuran kinerja mengacu pada Inpres No. 7 Tahun 1999 dan Keputusan LAN No. 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, pengukuran kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan Realisasi. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran, pencapaian kinerja program/kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan menggunakan media formulir pengukuran kinerja. Atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang terkait dengan Dinas Pertanahan Kota Batam sebagaimana visi pemerintah Kota Batam. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta indikator makro diberlakukan nilai disertai makna dari nilai tersebut, yaitu : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Pencapaian :} \quad \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana Tingkat Capaian}} \quad \times 100\%$$

Kategori Persentase Pencapaian Sasaran

No.	Nilai Angka	Interpretasi
1.	> 80	Sangat Baik
2.	60 - 79,9	Baik
3.	50 - 59,9	Sedang
4.	0 - 49,9	Kurang
5.	0	Data Tidak Lengkap

Analisis capaian kinerja tersebut selengkapnya tertuang pada bagian berikut ini.

3.1 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SKPD

Instansi pemerintah diwajibkan menetapkan indikator kinerja utama yang menggambarkan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Indikator Kinerja Utama merupakan indikator yang paling menentukan (strategis) bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, dan merupakan indikator kinerja yang dipilih dari beberapa indikator kinerja yang dimiliki organisasi tersebut.

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan manajemen kinerja secara baik, serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berpedoman kepada Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021 yang telah dilakukan revisi setiap tahunnya, yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021, tujuan dan sasaran kinerja Dinas Pertanahan yang telah ditetapkan dengan realisasi pencapaian sasaran indikator pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Program	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00%	100,00%	100,00%
			Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100,00%	100,00%	100,00%
		Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset tanah pemko Batam dan lahan masyarakat serta pengadaan lahan aset untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	72,00%	72,00%	100,00%
			Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	75,66%	47,88%	63,28%

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan pada SKPD Dinas Pertanahan Kota Batam dengan realisasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2020 berdasarkan target yang telah ditetapkan adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut :

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset tanah pemko Batam dan lahan masyarakat serta pengadaan lahan aset untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	72,00%	72,00%	100,00%
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	75,66%	47,88%	63,28%

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Strategis Tahun 2016-2021 ditetapkan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, serta pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran, yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja. Penetapan indikator kinerja kegiatan berdasarkan pada kelompok masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi dan tujuan pemerintah daerah, maka program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Pertanahan pada tahun 2020 dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2020 yang kemudian direvisi menjadi Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020, yang merupakan implementasi Rencana Strategis (Perubahan) Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016–2021.

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2020 tersebut, kegiatan yang dilaksanakan mencakup pelaksanaan 5 (lima) kegiatan DPA-SKPD untuk mendukung sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Secara ringkas pencapaian kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

No.	Sasaran (2016-2021)	Indikator Kinerja (2020)	Tingkat Capaian (%)
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset tanah pemko Batam dan lahan masyarakat serta pengadaan lahan aset untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	100,00%
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	63,28%

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap sasaran yang dituangkan pada tahun 2020, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Persentase ketersediaan Lahan Aset Pemko Batam

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran berupa persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam, dengan target 72,00% (pengadaan lahan aset 36 persil dari target lima tahunan sebanyak 50 persil), capaian indikator kinerja sasaran tahun 2020 mencapai 100% dengan kategori interpretasi *sangat baik*.

Indikator Kinerja		Capaian			
		Tahun 2019			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase	72,00%	72,00%	100,00

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2020 dengan capaian indikator kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	(%) rata-rata capaian	Ket
1	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	100,00	100,00	100,00	

Perbandingan realisasi sasaran tahun 2020 dan 2019 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Capaian			Naik (Turun)	Ket
		Satuan	Realisasi			
			2020	2019		
1	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase	100,00	100,00	-	Tetap

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019, maka pada tahun 2020 capaian dan realisasi dari indikator kinerja adalah tetap.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, maka realisasi kinerja dari indikator persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam sampai dengan tahun 2020 telah mencapai 72,00% (36 persil aset tanah pemko Batam) dari target 100,00% (50 persil) target kinerja lima tahunan (2016-2021) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi sd 2019 (%)				Target sd 2020 (%)	Realisasi sd 2020 (%)	Capaian (%)
		2016	2017	2018	2019			
1. Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase	-	-	26,00	46,00	72,00	72,00	100,00

Indikator sasaran kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan yang mendukung pencapaian indikator sasaran kinerja berupa persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam tahun 2020 adalah di bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah dan seksi Pengadaan Tanah (perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana terlampir pada halaman lampiran).

Berdasarkan Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2016-2021, indikator kinerja program pertama berupa persentase ketersediaan lahan aset pemko batam dicapai dengan melakukan pengadaan tanah untuk pembangunan prasarana, sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan utilitas (PSU) termasuk didalamnya fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan yang merupakan titik awal bagi Pemerintah Kota Batam untuk melengkapi infrastruktur Kota Batam. Untuk itu Dinas Pertanahan Kota Batam memilih kegiatan ini

menjadi salah satu prioritas yang harus dilakukan sehingga ketersediaan tanah untuk pembangunan dapat dipenuhi.

Secara anggaran, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran kinerja berupa persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam tahun 2020 adalah Program Penataan Tata Guna Tanah, dengan kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam.

Target capaian kinerja pengadaan lahan aset selama periode tahun 2016-2021 adalah 50 persil aset tanah. Realisasi kinerja dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 adalah 72,00%, yaitu 36 persil aset tanah dengan peruntukan sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada penjelasan secara rinci dari kegiatan pengadaan aset tanah Pemko Batam sebagai berikut:

1. *Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam*

Output kegiatan pengadaan dokumen aset tanah pada tahun 2020 adalah persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam 72,00% dengan outcome yang diharapkan berupa tersedianya lahan aset Pemko Batam sebanyak 72,00% untuk kegiatan pembangunan di Kota Batam.

Pengadaan lahan aset pemerintah Kota Batam diperuntukan untuk pembangunan prasarana, sarana pendidikan, kesehatan, perkantoran, dan utilitas (PSU) termasuk didalamnya fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan merupakan titik awal bagi Pemerintah Kota Batam untuk melengkapi infrastruktur Kota Batam. Target capaian kinerja pengadaan lahan aset selama periode tahun 2016-2021 adalah 50 persil aset tanah.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- (1) Pendataan dan melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait berkenaan dengan kebutuhan tanah di masing-masing dinas dan instansi.
- (2) Melakukan survei lokasi terkait dengan tanah yang diusulkan untuk diadakan (berdasarkan usulan dinas/instansi) mengenai kelayakan teknis dan administrasi tanah.
- (3) Berkoordinasi dengan Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam yang berwenang dalam pengalokasian tanah di Pulau Batam (mainland) terkait usulan kebutuhan tanah dari dinas/instansi.
- (4) Berkoordinasi dengan aparaturnya Kelurahan dan Kecamatan serta masyarakat terkait dengan tanah yang akan dihibahkan ke pemerintah daerah.
- (5) Berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Batam, serta bidang Aset BPKAD Kota Batam terkait pengadaan/akte serah terima PSU dari pengembang dan pengadaan aset melalui hibah dari BP Batam dan Pemerintah Provinsi dan Pusat.

Realisasi capaian sampai dengan tahun 2020 adalah 72,00%, yaitu 36 persil aset tanah dengan rincian peruntukan sebagai berikut:

Tabel. Realisasi Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam Tahun 2018-2019

No.	Pengadaan Aset tanah Pemko Batam	Jumlah	Keterangan
1.	Sekolah Dasar (SD)	2 Persil	SDN 005 dan SDN 008 Batuaji
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	5 Persil	SMPN 56, SMPN 57, SMPN Tanjung Uncang, SMP Botania, dan SMP Bukit Tempayan.
3.	SMA/SMK	5 Persil	SMAN 25 Tj Buntung, SMAN 26 Botania, SMAN 27 Buliang, SMAN Sei Beduk dan SMKN 9 Sei Binti.
4.	Puskesmas/Puskesmas Pembantu	4 Persil	Pustu Sei Lekop, Pustu P Seraya Tj Riau, Puskesmas Baloi Permai

			(relokasi), Puskesmas Mentarau;
5.	Kantor BLK	1 Persil	Kaw Industri Kabil (KIE)
6.	Pos Damkar	2 Persil	Samping Ktr Camat Nongsa
7.	Gedung Olahraga (GOR)	1 Persil	Legenda Malaka
8.	Lapangan Bola	4 Persil	Batu Besar, Legenda Malaka Baloi Permai, Sembulang, Sambau Nongsa
9.	Sentra Industri	1 Persil	Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) di Tg Buntung Bengkong

Tabel. Realisasi Pengadaan Lahan Aset Pemerintah Kota Batam Tahun 2020

No.	Pengadaan Aset tanah Pemko Batam	Jumlah	Keterangan
1.	Sekolah Dasar (SD)	2 Persil	SDN 001 Sekupang, SDN Tj Gundap
2.	Puskesmas/Puskesmas Pembantu	2 Persil	Pustu Tanjung Riau, Polindes Tj Gundap
3.	Gedung Serbaguna	1 Persil	Kelurahan Tanjung Riau
4.	Lapangan Bola	1 Persil	Kelurahan Tanjung Riau
5.	Jalan Dermaga/Pelantar	1 Persil	Kelurahan Tanjung Riau
6.	Makam	1 Persil	Makam Nong Isa, Nongsa
7.	Tanah Untuk Bangunan Air Bersih/Air Baku	4 Persil	Kelurahan Rempang Cate, Subang Mas, Pulau Abang di Kecamatan Galang, dan Kelurahan Pantai Gelang Kecamatan Bulang
8.	Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga	1 Persil	Pulau Panjang, Setokok, Bulang

B. Indikator Kinerja Persentase Lahan Aset Pemko Batam dan Lahan Masyarakat yang Berstatus Legal

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan capaian sasaran berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal, dengan target 75,66% yang berupa sertifikasi aset tanah Pemko Batam sebanyak 455 persil dari target lima tahunan sebanyak 630 persil lahan aset (data awal Renstra/RPJMD), dan sertifikasi tanah masyarakat sebanyak 400 persil dari target lima tahunan sebanyak 500 persil tanah masyarakat (target Renstra/RPJMD), capaian

indikator kinerja sasaran tahun 2020 hanya mencapai 63,28% dengan kategori interpretasi *baik*, sebagaimana tabel berikut:

Indikator Kinerja		Capaian			
		Tahun 2018			
		Satuan	Target	Realisasi	%
1	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	75,66%	47,88%	63,28%

Perbandingan capaian indikator kinerja tahun 2020 dengan capaian indikator kinerja tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2020 (%)	Capaian 2019 (%)	(%) rata-rata capaian	Ket	
1	Persentase lahan aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang berstatus legal	Persentase	63,28	79,54	71,41	

Perbandingan realisasi sasaran tahun 2020 dan 2019 sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Indikator Kinerja		Satuan	Capaian		Naik (Turun)	Ket
			Realisasi			
			2020	2019		
1	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	63,28	79,54	Turun	

Apabila dilihat dari perbandingan capaian indikator kinerja dan realisasi indikator kinerja tahun 2020 dengan tahun 2019, maka pada tahun 2020 capaian dan realisasi dari indikator kinerja turun.

Target awal indikator kinerja berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2020 adalah 55,13% (623 dokumen), yang kemudian mengalami perubahan (penambahan) pada Rencana Kerja Perubahan Tahun 2020 menjadi 75,66% (855 dokumen). Perubahan (penambahan) target indikator kinerja

tersebut dilakukan berkenaan dengan adanya rekomendasi Korsubgah KPK dan rekomendasi hasil audit BPK RI tahun 2019 untuk mempercepat pengurusan sertifikasi tanah aset Pemko Batam mengingat kondisi saat ini masih banyak tanah aset Pemko Batam yang belum memiliki dokumen sertifikat.

Apabila dilihat dari perbandingan capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dengan target kinerja lima tahunan yang direncanakan, maka realisasi kinerja dari indikator persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 47,88% (sertifikasi lahan aset 252 dokumen dari target lima tahunan 630 dokumen lahan aset yang ada, dan sertifikasi lahan masyarakat 289 dokumen dari target lima tahunan 500 dokumen) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Realisasi sd 2019 (%)				Target sd 2020 (%)	Realisasi sd 2020 (%)	Capaian (%)	
		2016	2017	2018	2019				
1	Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	17,43	26,46	35,75	36,11	75,66	47,88	63,28

Indikator sasaran kegiatan di lingkungan Dinas Pertanahan yang mendukung pencapaian indikator sasaran kinerja berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal tahun 2020 ada di 3 (tiga) bidang, yaitu bidang pemanfaatan dan pengadaan tanah, bidang penatagunaan dan pendayagunaan tanah, serta bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan (perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja sebagaimana terlampir pada halaman lampiran).

Aset tanah Pemerintah Kota Batam berdasarkan data awal tahun 2016 adalah 630 persil, realisasi sertifikasi sampai dengan tahun 2016 adalah

197 dokumen, sampai dengan tahun 2017 adalah 199 dokumen (penambahan realisasi 2 dokumen), sampai dengan tahun 2018 adalah 203 dokumen (penambahan realisasi 4 dokumen), sampai dengan tahun 2019 adalah 208 dokumen (penambahan 5 dokumen), dan sampai dengan tahun 2020 adalah 252 dokumen (penambahan 44 dokumen).

Kegiatan pengadaan sertifikat lahan aset Pemko Batam ini dilaksanakan dengan cara mengajukan permohonan tanah kepada BP Batam untuk mendapatkan penetapan lokasi (PL) atas nama Pemerintah Kota Batam yang akan dipergunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, selanjutnya mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) untuk diterbitkan sertifikat tanah dengan melampirkan kelengkapan dokumen berupa dokumen PL, Surat Perjanjian (SPj)/Perjanjian Pengalokasian Lahan (PPL), Surat Keputusan Pengalokasian Lahan (Skep), SK Bebas UWT, dan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat dari BP Batam terhadap aset tanah tersebut. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola tanah di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai institusi yang berwenang dalam penerbitan sertifikat tanah.

Capaian indikator kinerja dari program kegiatan masih rendah (tidak tercapai), hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Kondisi saat ini sebagian aset tanah pemerintah Kota Batam tidak memiliki kelengkapan dokumen PL, Surat Perjanjian (SPj)/Perjanjian Pengalokasian Lahan (PPL), Surat Keputusan Pengalokasian Lahan (Skep), dan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat dari BP Batam, sehingga belum bisa didaftarkan ke BPN untuk pengurusan sertifikat
- b. Aset tanah Pemko Batam tidak terdapat Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam yang menjadi syarat diterbitkannya sertifikat Hak Pakai atau Hak Milik.

- c. Mou (Perjanjian Kerjasama) dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) baru terbit di bulan Mei 2020, sehingga keterbatasan waktu dalam pengurusan sertifikasi tanah aset Pemko Batam di BPN.
- d. Sebagian besar anggaran pengurusan sertifikasi lahan aset Pemko Batam dialokasikan pada APBD Perubahan yang disahkan pada akhir September 2020 dimana pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan pada triwulan keempat tahun berjalan, sementara tenaga teknis pada Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) terkonsentrasi pada kinerja internal BPN berupa kegiatan identifikasi pengumpulan data fisik dan yuridis bidang tanah untuk penataan kota lengkap yang dilaksanakan oleh Tim Yuridis yang melibatkan Kantor Pertanahan Kota Batam dan Dinas Pertanahan Kota Batam, kegiatan updating zona nilai tanah dan PTSL, dan kegiatan sertifikasi aset pemerintah pusat meliputi BUMN dan instansi vertikal lainnya.

Pada indikator sasaran persentase lahan masyarakat yang berstatus legal, target dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 adalah 400 dokumen sertifikat tanah masyarakat, dan realisasi hanya 289 dokumen. Realisasi pada tahun 2017 adalah 100 dokumen, tahun 2018 adalah 100 dokumen, dan tahun tahun 2020 adalah 89 dokumen.

Kondisi saat ini diketahui bahwa sebagian besar lahan masyarakat (terutama di wilayah hinterland) belum memiliki dokumen legalitas berupa sertifikat hak milik, hal tersebut secara umum dapat memicu munculnya permasalahan pertanahan secara umum. Untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan memotivasi masyarakat untuk mengurus legalitas tanah, Dinas Pertanahan melakukan fasilitasi pengurusan sertifikat tanah hak masyarakat (Proda) yang dimulai sejak tahun 2017.

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan, dibentuk Tim Percepatan Pengurusan Dokumen Sertifikat Tanah yang beranggotakan Tim Teknis

dari Pemerintah Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) dengan komposisi yang proporsional. Strategi yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah koordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Batam yang mempunyai kewenangan dalam penerbitan dokumen sertifikat tanah, serta koordinasi dengan masyarakat pemilik hak atas tanah di lapangan.

Indikator sasaran kinerja jumlah dokumen sertifikat tanah masyarakat didukung dengan pendanaan APBD pada Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat.

Pada tahun 2020, untuk menindaklanjuti kebijakan Presiden RI yang didukung oleh kebijakan Walikota Batam untuk mempercepat penyelesaian legalitas (penataan) kampung tua Kota Batam maka melalui APBD Perubahan Kota Batam Tahun 2020 telah dialokasikan penambahan anggaran pengurusan sertifikat lahan masyarakat kampung tua sebanyak 1000 dokumen pada kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat.

Fasilitasi pengurusan sertifikasi lahan masyarakat kampung tua sebanyak 1000 dokumen sampai dengan akhir tahun anggaran 2020 tidak dapat direalisasikan. Tidak terealisasinya kegiatan ini dikarenakan:

1. Berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) nomor 860/21.71.300/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, BPN menetapkan 9 (Sembilan) persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan sertifikasi lahan masyarakat kampung tua, dimana dengan keterbatasan waktu tidak dapat dipenuhi sehingga proses pengurusan sertifikasi lahan masyarakat kampung tua tidak dapat dilaksanakan.
2. Tidak terbitnya rekomendasi sertifikat hak milik pada kampung tua Kota Batam oleh BP Batam.

Indikator sasaran persentase ketersediaan database lahan aset Pemko Batam terealisasi 100,00% dari target 100,00%, dengan capaian 100,00%.

Data aset tanah Pemko yang berdasarkan data awal RPJMD Kota Batam (tahun 2016) adalah 630 persil yang tersebar diseluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Batam. Sampai dengan tahun 2016 telah dilakukan inventarisasi dan penginputan database aset tanah sebanyak 200 persil (31,74%). Pada tahun 2017, 2018, 2019, dan 2020 berturut-turut kegiatan inventarisasi aset tanah dilakukan pada 100 persil, 150 persil, 180 persil, dan 90 persil aset tanah dan telah dilakukan penginputan dan updating database aset tanah, sehingga keseluruhan aset tanah yang telah diinput di database lahan aset adalah 720 persil, atau 100,00%.

Dengan tersedianya database lahan aset Pemko Batam ini diharapkan kedepan pemerintah Kota Batam memiliki database pertanahan, sehingga terciptanya tertib administrasi bidang pertanahan di Kota Batam. Salah satu wujud nyata dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan adalah dengan jalan pengendalian dalam penggunaan dan kepemilikan tanah. Selanjutnya dengan tersedianya database lahan aset Pemko Batam dapat diketahui dengan jelas status legalitas lahan aset Pemko Batam dan kondisi yang up to date eksisting aset tanah yang ada.

Keberadaan kampung tua merupakan sejarah panjang bagi Batam (tanah melayu) yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun lalu, namun dengan semakin berkembangnya pembangunan di Kota Batam membuat semakin meningkatnya kebutuhan akan lahan, disamping memunculkan konflik di lapangan tentang permasalahan di bidang pertanahan. Keberadaan perkampungan tua di Kota Batam terus mengalami pengusuran, hal tersebut dikarenakan belum adanya legalitas lahan kampung tua.

Dalam upaya melestarikan dan mempertahankan kelestarian budaya melayu, telah dikeluarkan Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 tanggal 23 Maret 2004, tentang Penetapan Wilayah Perkampungan Tua di Kota Batam, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah kota Batam dengan melakukan pengukuran dan pemetaan kampung tua yang ada di Kota Batam, dimana kegiatan ini telah dimulai sejak tahun 2006 dan telah selesai dilakukan pada tahun 2011. Maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melestarikan kampung tua yang bernuansa Melayu dan perlindungan hak masyarakat melayu.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan pengukuran dan pemetaan kampung tua, telah dikeluarkan Keputusan Bersama Walikota Batam dan Kepala BP Kawasan Batam Nomor Kpts 41/SKB/HK/I/2012 – Nomor 03/SKB/2011 tanggal 19 Agustus 2011 tentang Tim Penyelesaian Kampung Tua di Kota Batam. Mulai tahun 2012-2014 telah dilakukan (1) kegiatan verifikasi kampung tua di 33 lokasi kampung tua yang dilakukan oleh Tim Verifikasi yang beranggotakan unsur-unsur BP Kawasan, RKWB (Rumpun Khasanah Warisan Budaya), dan Pemko Batam, (2) kegiatan pemasangan patok batas di 12 lokasi kampung tua (2014-2015) dan 21 lokasi kampung tua (rencana tahun 2016), dan dilanjutkan dengan (3) kegiatan inventarisasi lahan masyarakat perkampungan tua pada tahun 2015 di 34 lokasi kampung tua.

Sampai dengan tahun 2018, progres penyelesaian kampung tua di Kota Batam adalah telah dilakukannya penandatanganan Berita Acara Kesepakatan dan telah ditetapkan PL Kampung Tua oleh BP Batam pada 7 (tujuh) lokasi, yaitu Kampung Tua Nongsa Pantai, Batu Besar, Kampung Panau, Tanjung Riau, Cunting, Sei Binti, Sei Lekop, dan Bakau Serip. Dari 8 (delapan) PL Kampung Tua tersebut, 7 (tujuh) PL telah diterbitkan dan dimana masih 2 (Dua) PL yang tidak sesuai luasannya dengan usulan Tim

dan Hasil Kesepakatan antara Walikota Batam dan Ketua BP Kawasan Batam yang difasilitasi oleh Gubernur Kepri, yaitu kampung tua Batu Besar dan kampung tua Kampung Panau, serta 1 (satu) kampung tua yang masih dalam proses penerbitan PL (kesepakatan dan persetujuan sudah ada dari BP Batam).

Penyelesaian kampung tua memerlukan kesungguhan, keseriusan, dan komitmen pihak-pihak terkait terutama BP Kawasan Batam, sehingga pengakuan hak masyarakat perkampungan tua dapat segera terwujud, serta terjadinya peningkatan pemberdayaan masyarakat kampung tua. Selanjutnya dilakukan pemberdayaan terhadap kampung tua tersebut melalui legalitas lahan, penataan kampung tua, dan peningkatan infrastruktur pendukung kemajuan kampung tua diberbagai bidang.

Pada tahun 2019, menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden RI terkait penyelesaian masalah legalitas lahan kampung tua, Bapak Walikota Batam melalui Surat Keputusan Nomor KPTS.170/HK/V/2019 telah membentuk Tim Penyelesaian Legalitas Kampung Tua Kota Batam yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam, dengan beranggotakan semua unsur terkait, yaitu Pemko Batam, BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN), Kecamatan, dan RKWB.

Kebijakan penyelesaian masalah legalitas lahan kampung tua yang dicanangkan sejak tahun 2019 ini secara signifikan merubah target sasaran Renstra Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021, dimana target indikator kinerja program awalnya adalah Jumlah PL kampung tua sebanyak 34 kampung, direviu dan diubah menjadi jumlah kampung tua yang ditata sebanyak 22 kampung (sertifikasi hak kepemilikan masyarakat kampung tua). Perubahan target indikator sasaran sebagaimana diuraikan diatas telah dituangkan kedalam Renstra Perubahan Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2016-2021.

Realisasi capaian indikator kinerja program ini pada tahun 2019 adalah 150,00%, yaitu telah ditata dan dilakukan pengurusan sertifikasi 3 kampung tua dari target 2 kampung tua, dengan lokasi (1) Kampung Tua Tanjung Riau, (2) Kampung Tua Sei Binti, dan (3) Kampung Tua Tanjung Gundap. Jumlah sertifikat hak milik masyarakat yang telah diterbitkan di 3 (tiga) lokasi kampung tua tersebut adalah 1.398 sertifikat.

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2020 adalah 40,00%, yaitu telah ditata dan dilakukan pengurusan sertifikasi 4 kampung tua dari target 10 kampung tua, dengan lokasi (1) Kampung Tua Nongsa Pantai, (2) Kampung Tua Telaga Punggur, (3) Kampung Tua Tiawanggang, dan (4) Kampung Tua Piayu Laut. Tidak terealisasinya kegiatan 100,00% dikarenakan tidak terbitnya rekomendasi sertifikat hak milik pada kampung tua Kota Batam oleh BP Batam sebagaimana diuraikan diatas. Jumlah sertifikat hak milik masyarakat yang telah diterbitkan di 4 (empat) lokasi kampung tua tersebut adalah 470 sertifikat.

Selain itu untuk mempercepat penyelesaian legalitas lahan masyarakat kampung tua, melalui APBD perubahan Pemerintah Kota Batam tahun 2020, telah dialokasikan anggaran untuk penyelesaian tata batas kampung tua yang berada dalam kawasan hutan di 7 lokasi kampung tua pada kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua. Kegiatan ini telah terealisasi secara fisik 100,00% dan telah dilakukan penataan batas 7 lokasi kampung tua yang berada didalam kawasan hutan dengan luasan 29,31 hektar (yang telah diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan). Adapun lokasi kampung tua tersebut adalah: (1) Kampung Tua Teluk Lengung, (2) Kampung Tua Tereh, (3) Kampung Tua Dapur 12, (4) Kampung Tua Tanjung Gundap, (5) Kampung Tua Tiangwanggang, (6) Kampung Tua Setengar, dan (7) Kampung Tua Belian.

Di bidang pengawasan pertanahan dan penanganan masalah pertanahan, selama tahun 2020 terdapat 3 (tiga) pengaduan masalah lahan yang masuk ke Dinas Pertanahan dan telah ditindaklanjuti. Adapun pengaduan masalah lahan yang telah ditindak lanjuti diuraikan sebagai berikut:

No.	Pengaduan Masalah Lahan	Lokasi	Keterangan
1.	Permasalahan pegeseran pagar dan drainase oleh pihak pengembang perumahan di Kelurahan Bengkong Sadai Kecamatan Bengkong.	Perumahan RT 01 RW 22 Blok C1/2 Kelurahan Bengkong Sadai, Kecamatan Bengkong.	Setelah meneliti surat izin kepemilikan yang dimiliki oleh PT. Bintang Perkasa maka untuk sementara pembangunan pagar pembatas dan drainase yang dibangun oleh pihak perumahan dihentikan sementara sampai terbitnya surat izin keluar dari dinas terkait.
2.	Nelayan mengeluhkan tempat tambat sampan mereka yang tidak diberikan izin oleh pihak PT. Nongsa Pura Wanabahari yang dulunya biasa mereka gunakan untuk tambat labuh perahu nelayan sekitar wilayah tersebut.	Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa.	Telah dilakukan survey lokasi (peninjauan lapangan) ke lokasi tambatan perahu di Kelurahan Sambau, dan telah meminta keterangan dari pihak PT. Nongsa Pura Wanabahari.
3.	Lanjutan permasalahan lahan Perumahan Palazzo Garden Batam Center.	Perumahan Palazzo Garden Batam Center Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Center.	Tanah Perumahan Palazzo Garden Batam Center yang dikuasai oleh PT. Tai Fu (3,5 ha) di klaim oleh Bapak Yohanes sebagai tanah beliau dan belum diganti rugi oleh pihak PT. Tai Fu (rapat lanjutan dari tahun 2019).

Secara anggaran, program dan kegiatan yang mendukung pencapaian indikator sasaran kinerja berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan tanah masyarakat yang berstatus legal tahun 2020 adalah Program Penataan Tata Guna Tanah, dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam
2. Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat
3. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Penjelasan secara rinci dari masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

1. *Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam*

Indikator output kegiatan pengadaan dokumen lahan aset adalah jumlah dokumen sertifikat aset tanah Pemerintah Kota Batam dengan target 247 dokumen, dan indikator outcome berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal 75,66%.

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara melakukan pendataan terhadap lahan aset yang belum memiliki dokumen sertifikasi tanah serta dokumen penetapan lokasi (PL) atas nama Pemerintah Kota Batam (untuk wilayah mainland). Selanjutnya mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) untuk diterbitkan sertifikat tanah dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang diperlukan. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan instansi Badan Pengusahaan Batam sebagai pengelola tanah di Pulau Batam dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) sebagai institusi yang berwenang dalam penerbitan sertifikat tanah.

Keberhasilan pencapaian target sasaran ini akan berakibat pada tingkat pembangunan sarana dan prasarana Kota Batam, dimana dengan keberhasilan ini Pemerintah Kota Batam akan memiliki tanah yang memiliki kejelasan status legalitas untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti sekolah, rumah sakit, kantor, dan lain-lain.

Pada kondisi awal periode RPJMD (2016), aset tanah Pemerintah Kota Batam telah memiliki 197 sertifikat, dan bertambah menjadi 252

sertifikat sampai dengan tahun 2020 dari target data awal 630 aset tanah.

Secara garis besar beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Kondisi saat ini sebagian aset tanah pemerintah Kota Batam tidak memiliki kelengkapan dokumen PL, Surat Perjanjian (SPj)/Perjanjian Pengalokasian Lahan (PPL), Surat Keputusan Pengalokasian Lahan (Skep), dan Rekomendasi Penerbitan Sertifikat dari BP Batam, sehingga belum bisa didaftarkan ke BPN untuk pengurusan sertifikat
- b. Aset tanah Pemko Batam tidak terdapat Hak Pengelolaan (HPL) BP Batam yang menjadi syarat diterbitkannya sertifikat Hak Pakai atau Hak Milik.
- c. Mou (Perjanjian Kerjasama) dengan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) baru terbit di bulan Mei 2020, sehingga keterbatasan waktu dalam pengurusan sertifikasi tanah aset Pemko Batam di BPN.
- d. Sebagian besar anggaran pengurusan sertifikasi lahan aset Pemko Batam dialokasikan pada APBD Perubahan yang disahkan pada akhir September 2020 dimana pelaksanaannya baru dapat dilaksanakan pada triwulan keempat tahun berjalan, sementara tenaga teknis pada Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) terkonsentrasi pada kinerja internal BPN berupa kegiatan identifikasi pengumpulan data fisik dan yuridis bidang tanah untuk penataan kota lengkap yang dilaksanakan oleh Tim Yuridis yang melibatkan Kantor Pertanahan Kota Batam dan Dinas Pertanahan Kota Batam, kegiatan updating zona nilai tanah dan PTSL, dan

kegiatan sertifikasi aset pemerintah pusat meliputi BUMN dan instansi vertikal lainnya.

2. Kegiatan Pengurusan Sertifikat Lahan Masyarakat

Kegiatan fasilitasi pengurusan sertifikat lahan masyarakat ini merupakan kegiatan pengurusan sertifikat tanah secara massal oleh Dinas Pertanahan Kota Batam dengan sasaran masyarakat tidak mampu di wilayah hinterland Kota Batam. Kegiatan ini baru dilaksanakan di tahun 2017 mengingat banyaknya usulan dari masyarakat melalui forum musrenbang tingkat kelurahan.

Adapun kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan tertib administrasi pertanahan dan mendukung program nasional melalui kegiatan PRONA yang dilaksanakan oleh BPN RI. Pasal 19 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, antara lain melanjutkan penyelenggaraan percepatan pendaftaran tanah sesuai dengan amanat Pasal 19 tersebut, terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah sampai menengah melalui kegiatan PRONA yang sudah dilaksanakan sejak tahun 1981.

Percepatan pendaftaran tanah diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip bahwa tanah secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berperan secara jelas

untuk terciptanya tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan, menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara untuk meminimalkan perkara, masalah, sengketa dan konflik pertanahan. Selain daripada itu percepatan pendaftaran tanah juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan pelaksanaan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan penguatan hak-hak rakyat atas tanah

Kegiatan pengurusan sertifikasi lahan masyarakat pada tahun 2020 terdiri dari 4 (empat) tahapan pelaksanaan kegiatan, yaitu (1) Koordinasi dengan Kelurahan/Kecamatan setempat dan pengumpulan data awal, (2) Sosialisasi kepada masyarakat, (3) Survei dan Pengukuran lapangan, serta pemberkasan dokumen untuk pengusulan sertifikasi tanah ke Kantor Pertanahan Batam (BPN RI), dan (4) Kegiatan sertifikasi tanah dengan bekerjasama dengan Kantor Pertanahan (BPN) Kota Batam.

Indikator output kegiatan pengadaan dokumen lahan aset adalah jumlah dokumen sertifikat lahan masyarakat 1.243 dokumen (243 dokumen untuk lahan masyarakat hinterland dan 1.000 dokumen untuk lahan masyarakat kampung tua), dan indikator outcome berupa persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal 75,66%.

Capaian indikator output kegiatan pada tahun 2020 hanya 89 dokumen dari target 1.243 dokumen. Secara garis besar beberapa hambatan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) nomor 860/21.71.300/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020, BPN menetapkan 9 (Sembilan) persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengurusan sertifikasi lahan masyarakat kampung tua,

dimana dengan keterbatasan waktu tidak dapat dipenuhi sehingga proses pengurusan sertifikasi lahan masyarakat kampung tua tidak dapat dilaksanakan.

- b. Tidak terbitnya rekomendasi sertifikat hak milik pada kampung tua Kota Batam oleh BP Batam.

3. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Melalui kegiatan penataan lahan kampung tua ini diharapkan terselesaikannya penataan batas lahan kampung tua dengan kawasan hutan di 7 lokasi kampung tua yang masuk dalam kawasan hutan, dan penataan lahan masyarakat di 10 lokasi kampung tua.

Sebagai tindak lanjut dari kegiatan inventarisasi dan verifikasi kampung tua yang telah dilaksanakan sejak tahun 2012, pada tahun 2014 telah dilakukan penandatanganan Berita Acara Kesepakatan batasan dan luasan kampung tua antara pihak terkait di 7 (tujuh) kampung tua, dan pada tahun 2015 telah ditetapkan PL nya, yang meliputi lokasi (1) Kampung Tua Nongsa Pantai, (2) Batu Besar, (3) Kampung Panau, (4) Tanjung Riau, (5) Cunting, (6) Sei Binti, dan (7) Sei Lekop. Dari 7 (Tujuh) PL Kampung Tua yang telah diterbitkan, ada 2 (Dua) PL yang tidak sesuai luasannya dengan usulan Tim dan Hasil Kesepakatan antara Walikota Batam dan Ketua BP Kawasan Batam yang difasilitasi oleh Gubernur Kepri, yaitu kampung tua Batu Besar dan kampung tua Kampung Panau.

Pada tahun 2017 telah dilakukan penyusunan dokumen rencana penataan kampung tua dengan lokasi: (1) Kampung Nongsa Pantai, (2) Kampung Tanjung Riau, dan (3) Bakau Serip. Sedangkan untuk lokasi kampung tua yang telah mendapat persetujuan dan akan diterbitkan dokumen PL berdasarkan Surat Kepala BP Batam bulan

September 2017 adalah Kampung Tua Bakau Serip.

Pada tahun 2019, menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden RI terkait penyelesaian masalah legalitas lahan kampung tua, Bapak Walikota Batam telah membentuk Tim Penyelesaian Legalitas Kampung Tua Kota Batam yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam, dengan beranggotakan semua unsur terkait, yaitu Pemko Batam, BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN), Kecamatan, dan RKWB. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyelesaian Legalitas Lahan Kampung Tua Kota Batam antara lain: Rapat Koordinasi untuk menyepakati luasan, Survey pengukuran 37 titik kampung tua, dan 3 titik pemukiman masyarakat di lokasi dan selanjutnya diajukan proses legalitas perolehan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang berupa Hak Milik dan Hak Pakai sesuai peraturan perundangan.

Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 adalah telah dilakukan penataan dan pengurusan sertifikasi lahan masyarakat di 7 kampung tua, dengan lokasi (1) Kampung Tua Tanjung Riau, (2) Kampung Tua Sei Binti, (3) Kampung Tua Tanjung Gundap, (4) Kampung Tua Nongsa Pantai, (5) Kampung Tua Telaga Punggur, (6) Kampung Tua Tiawangkan, dan (7) Kampung Tua Piayu Laut.

Selain itu untuk mempercepat penyelesaian legalitas lahan masyarakat kampung tua, melalui APBD perubahan Pemerintah Kota Batam tahun 2020, telah dialokasikan anggaran untuk penyelesaian tata batas kampung tua dengan kawasan hutan di 7 lokasi kampung tua pada kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua. Kegiatan ini telah terealisasi secara fisik 100,00% dan telah dilakukan penataan batas 7 lokasi kampung tua yang berada didalam kawasan hutan dengan

luasan 29,31 hektar (yang telah diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan). Adapun lokasi kampung tua tersebut adalah: (1) Kampung Tua Teluk Lengung, (2) Kampung Tua Tereh, (3) Kampung Tua Dapur 12, (4) Kampung Tua Tanjung Gundap, (5) Kampung Tua Tiangwangkang, (6) Kampung Tua Setengar, dan (7) Kampung Tua Belian.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan tahun 2020, telah dianggarkan dalam DPA Dinas Pertanahan Kota Batam (APBD Perubahan) tahun 2020 sebesar Rp 2.175.093.771,74 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma tujuh empat sen) yang dijabarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang terbagi dalam 5 (lima) kegiatan dengan rincian 2 kegiatan ex biaya administrasi umum (EX BAU) sebesar Rp. 538.976.771,74 (lima ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma tujuh empat sen) dan 3 (tiga) kegiatan teknis sebesar Rp. 1.636.117.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta seratus tujuh belas ribu rupiah). Perincian alokasi dan realisasi anggaran Dinas Pertanahan Kota Batam tahun 2020 dapat dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran 2020 (Rp.)	Realisasi 2020		Ket	
			Keuangan			Fisik (%)
			(Rp.)	(%)		
	BELANJA LANGSUNG	2.175.093.771,74	628.392.163,-	28,89	47,63	
I.	Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	501.110.743,-	363.156.015,-	72,47	100,00	
1.	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	501.110.743,-	363.156.015,-	72,47	100,00	

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran 2020 (Rp.)	Realisasi 2020			Ket
			Keuangan		Fisik (%)	
			(Rp.)	(%)		
II.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.866.028,74	37.858.528,-	99,98	100,00	
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	37.866.028,74	37.858.528,-	99,98	100,00	
III.	Program Penataan Tata Guna Tanah	1.636.117.000,-	227.377.620,-	13,90	30,38	
3.	Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam	652.902.800,-	17.190.200,-	2,63	17,81	
4.	Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat	652.100.000,-	49.651.120,-	7,61	7,61	
5.	Penataan Lahan Kampung Tua	331.114.200,-	160.536.300,-	48,48	100,00	

Anggaran Belanja Langsung APBD (Perubahan) Kota Batam Tahun Anggaran 2020 pada SKPD Dinas Pertanahan Daerah Kota Batam adalah Rp 2.175.093.771,74 (dua milyar seratus tujuh puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah koma tujuh empat sen) yang meliputi 5 (lima) kegiatan/DPA, dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 628.392.163,- atau 28,89%,- dan realisasi fisik sebesar 47,63%.

Realisasi keuangan dan fisik untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

- a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran meliputi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 501.110.743,- Realisasi keuangan adalah Rp. 363.156.015,- atau 72,47% dan realisasi fisik 100,00%.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur meliputi 1 (satu) kegiatan dengan anggaran Rp. 37.866.028,74 Realisasi keuangan adalah Rp. 37.858.528,- atau 99,98% dan realisasi fisik 100,00%.

- c. Program Penataan Tata Guna Tanah meliputi 3 (tiga) kegiatan dengan anggaran Rp. 1.636.117.000,- Realisasi keuangan adalah Rp. 227.377.620,- atau 13,90% dan realisasi fisik 30,38%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanahan Kota Batam Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dibidang pertanahan daerah, Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Pertanahan Kota Batam dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya. Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya masyarakat dan berbagai pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang hasil pembangunan yang telah dilakukan oleh jajaran Dinas Pertanahan Kota Batam. Dimasa mendatang Dinas Pertanahan Kota Batam akan melakukan langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Dinas Pertanahan Kota Batam sebagai salah satu instansi pendukung dalam pembangunan Kota Batam telah berusaha dengan berbagai upaya agar terwujud peningkatan pembangunan secara berkesinambungan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi walaupun belum seluruhnya upaya tersebut mencapai hasil sesuai dengan harapan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pertanahan Kota Batam tentu tidak terlepas dari permasalahan tanah yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan, Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan tanah tersebut, dapat dikategorikan dalam 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, Faktor internal yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu kekuatan (strengthness) maupun kelemahan (weakness) dalam organisasi, Unsur-unsur kekuatan yang dapat dijadikan suatu kelebihan dari Dinas Pertanahan meliputi : 1. Dinas Pertanahan merupakan OPD yang diberi mandat pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan urusan pertanahan di daerah sebagai bagian integral dari pemerintah Kota Batam; 2. Tersedianya dukungan pimpinan daerah yang sangat kuat untuk menjalankan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi dinas pertanahan; 3. Adanya komitmen dan semangat bersama antara pimpinan dan staf di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik dan inovatif. Disamping kekuatan yang dimiliki tersebut, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam lingkungan Dinas Pertanahan yaitu : 1. Belum terstandarisasinya kuantitas dan kualitas sumberdaya manusia yang ada; 2. Belum terstandarisasinya secara penuh keseluruhan dukungan sarana dan prasarana kerja; 3. Belum adanya peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan tugas di bidang pertanahan.

Faktor Eksternal yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dapat menjadi suatu peluang (opportunities) maupun ancaman (threats) dalam organisasi, Beberapa peluang yang dimiliki Dinas Pertanahan Kota Batam, antara lain : 1. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen legalitas tanah milik; 2. Sikap proaktif instansi terkait dalam pengurusan dokumen legalitas aset tanah pemerintah; dan 3. Dukungan stakeholders dalam penyelesaian kampung tua Kota Batam. Sedangkan ancaman yang dimiliki Dinas Pertanahan Kota Batam yaitu Adanya 3 institusi yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan di Kota Batam, yaitu Pemerintah Kota Batam, BP Batam, dan Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN RI).

Dalam menyikapi perkembangan Kota Batam saat ini, maka perlu diambil langkah-langkah strategis agar tugas dan fungsi Dinas Pertanahan Kota Batam dapat berjalan dengan baik sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Renja Kerja (Renja) Dinas Pertanahan. Langkah-langkah strategis tersebut antara lain:

1. Mempersiapkan Dinas Pertanahan Kota Batam sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam;

2. Melakukan koordinasi internal untuk evaluasi seluruh pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2020 sehingga menjadi bahan masukan untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2021;
3. Mengambil dan menetapkan kebijakan yang dapat mendukung program kerja Walikota Batam di bawah koordinasi Sekretariat Daerah Kota Batam;
4. Menyusun dan menetapkan langkah-langkah strategis dimasa datang berdasarkan evaluasi kerja tahun anggaran 2020;
5. Meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi dengan instansi vertikal seperti kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) dan Badan Pengusahaan (BP) Batam untuk perencanaan penatagunaan tanah di Kota Batam umumnya serta Rempang dan Galang pada khususnya;
6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan mengirim petugas teknis dan staf untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
7. Penambahan dan penempatan tenaga teknis sesuai dengan latar belakang pendidikan teknis guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan tugas-tugas dinas.

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2020

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURZALIE, AP., S.Sos**
Jabatan : **KEPALA DINAS**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD RUDI**
Jabatan : **WALIKOTA BATAM**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MUHAMMAD RUDI

Batam, Januari 2020
Pihak Pertama,

NURZALIE, AP., S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100,00
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	72,00%
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	55,13%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp 813.151.050,00	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp 85.732.057,48	
3. Program Penataan Tata Guna Tanah	Rp 139.100.000,00	

Batam, Januari 2020

WALIKOTA BATAM

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**


MUHAMMAD RUDI


**NURZALIE, AP., S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURZALIE, AP. S.Sos**
Jabatan : **KEPALA DINAS**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD RUDI**
Jabatan : **WALIKOTA BATAM**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

MUHAMMAD RUDI

Batam, Juli 2020
Pihak Pertama,

NURZALIE, AP. S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100,00
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	72,00%
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	55,13%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 415.526.293,00	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 37.866.028,74	
3. Program Penataan Tata Guna Tanah	Rp. 71.800.000,00	

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Batam, Juli 2020

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**



NURZALIE, AP. S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NURZALIE, AP. S.Sos**

Jabatan : **KEPALA DINAS**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. H. SYAMSUL BHRUM, AMP, M.Si, Ph.D**

Jabatan : **Pjs WALIKOTA BATAM**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Batam, Oktober 2020
Pihak Pertama,

Drs. H. SYAMSUL BHRUM, AMP, M.Si, Ph.D

NURZALIE, AP. S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100,00
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	100,00
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	72,00%
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	75,66%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 501.110.743,00	
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 37.866.028,74	
3. Program Penataan Tata Guna Tanah	Rp. 1.636.117.000,00	

Batam, Oktober 2020

Pjs WALIKOTA BATAM

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**



Drs. H. SYAMSUL BAHRUM, AMP, M.Si, Ph.D



**NURZALIE, AP. S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001**

PENGUKURAN KINERJA
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
TAHUN 2020



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase	100,00	10,19	10,19
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100,00	10,26	10,26
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase	72,00	46,00	46,00
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	55,13	36,11	36,11

<u>Program</u>	<u>Pagu</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 813.151.050,00	Rp. 80.913.005,00	9,95%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 85.732.057,48	Rp. 0,00	0,00%
3. Program Penataan Tata Guna Tanah	Rp. 139.100.000,00	Rp. 6.300.000,00	4,53%
	Rp. 1.037.983.107,48	Rp. 87.213.005,00	8,40%

Batam, 1 April 2020

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM



NURZALIE, AP. S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase	100,00	62,68	62,68
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100,00	82,31	82,31
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase	72,00	46,00	46,00
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	55,13	36,64	36,64

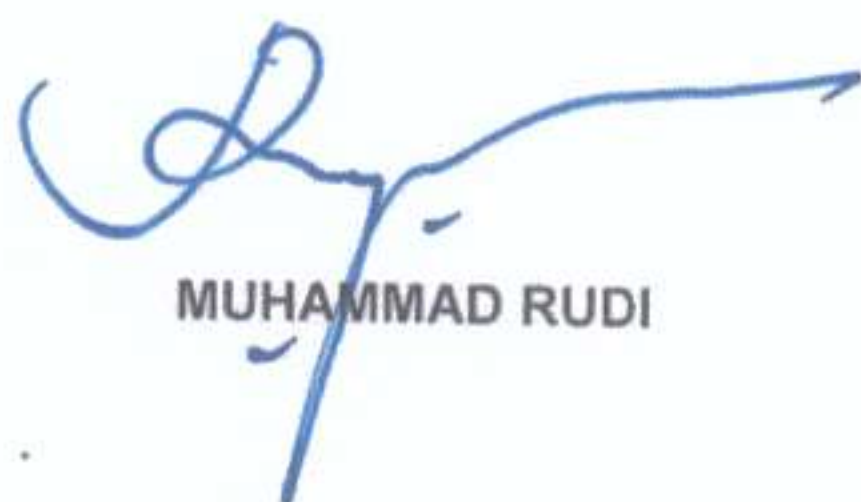
Program

	<u>Pagu</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 415.526.293,00	Rp. 216.797.797,00	62,68%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 37.866.028,74	Rp. 6.700.000,00	82,31%
3. Program Penataan Tata Guna Tanah	Rp. 71.800.000,00	Rp. 6.300.000,00	4,53%
	Rp. 525.192.321,74	Rp. 229.797.797,00	56,89%

Batam, Juli 2020

WALIKOTA BATAM

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI



NURZALIE, AP. S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase	100,00	53,45	53,45
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100,00	100,00	100,00
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko Batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase	72,00	46,00	46,00
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	75,66	47,26	62,46

Program

	<u>Pagu</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 501.110.743,00	Rp. 267.825.030,00	53,45%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 37.866.028,74	Rp. 37.858.528,00	99,98%
3. Program Penataan Tata Guna Tanah	Rp. 1.636.117.000,00	Rp. 64.225.600,00	4,53%
	Rp 2.175.093.771,74	Rp 369.909.158,00	17,01%

Batam, 12 Oktober 2020

Pjs WALIKOTA BATAM

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**


Drs. H. SYAMSUL BAHRUM, AMP, M.Si, Ph.D


NURZALIE, AP. S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM


SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan berkualitas	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Cakupan sarana dan prasarana aparatur	Persentase	100,00	100,00	100,00
2.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam dan tanah masyarakat serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemko Batam dalam meningkatkan pelayanan publik	Persentase ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Persentase	72,00	72,00	100,00
		Persentase lahan aset Pemko Batam dan lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	75,66	47,88	63,28

<u>Program</u>	<u>Pagu</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 501.110.743,00	Rp. 363.156.015,00	72,47%
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Rp. 37.866.028,74	Rp. 37.858.528,00	99,98%
3. Program Penataan Tata Guna Tanah	Rp. 1.636.117.000,00	Rp. 227.377.620,00	13,90%
	Rp 2.175.093.771,74	Rp 628.392.163,00	28,89%

Batam, Desember 2020

WALIKOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI

KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM


NURZALIE, AP. S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
SEKRETARIS DINAS

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pelayanan administrasi umum	Persentase waktu pelayanan surat masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan	Persentase	100,00	100,00	100,00
2.	Berfungsinya barang milik daerah dengan baik	Persentase barang milik daerah yang dipelihara Dengan baik	Persentase	100,00	100,00	100,00
3.	Meningkatnya implementasi akuntabilitas kinerja SKPD	Persentase dokumen perencanaan yang dikirim tepat waktu	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Terlaksananya Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase	100,00	100,00	100,00
4.	Terciptanya tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel	Persentase SPJ yang masuk dan dapat diproses pembayarannya	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Persentase capaian realisasi keuangan pengelolaan program/kegiatan tepat waktu sesuai dengan anggaran kas	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Persentase temuan hasil pemeriksaan internal / eksternal yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00	100,00	100,00
5.	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase usulan kenaikan pangkat yang diproses tepat waktu	Persentase	100,00	100,00	100,00

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
		Persentase usulan pensiun yang diproses tepat waktu	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Persentase usulan kenaikan gaji berkala yang diproses tepat waktu	Persentase	100,00	100,00	100,00
6.	Meningkatnya disiplin pegawai	Persentase kehadiran pegawai pada apel pagi tepat waktu	Persentase	100,00	100,00	100,00
7.	Meningkatnya pelayanan administrasi umum	Persentase waktu pelayanan surat masuk yang dapat diproses sesuai dengan tujuan berdasarkan	Persentase	100,00	100,00	100,00

Program

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
3. Program Penataan Tata Guna Tanah

Pagu

Realisasi

%

Rp. 501.110.743,00	Rp. 363.156.015,00	72,47%
Rp. 37.866.028,74	Rp. 37.858.528,00	99,98%
Rp. 331.114.200,00	Rp. 160.536.300,00	48,48%
<hr/>		
Rp. 870.090.971,74	Rp. 561.550.843,00	64,54%



Batam, 30 Desember 2020

SEKRETARIS DINAS

ISMIT ISMAIL, SIP., M.Si
NIP. 19680510 198810 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IVTAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KEPALA BIDANG PENATAGUNAAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas penataan kawasan tertentu di Kota Batam	Penyelesaian penataan lahan kampung tua	Kampung	10	4	40,00

Program

Paqu

Realisasi

%

1. -

-

-

-

Batam, 30 Desember 2020

**KABID PENATAGUNAAN DAN
PENDAYAGUNAAN TANAH**

AZHARI, SE
NIP. 19630302 198603 1 031

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**



NURZALIE, AP. S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KEPALA BIDANG PEMANFAATAN DAN PENGADAAN TANAH

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas aset Pemko	Persentase lahan Pemko Batam yang berstatus legal	Persentase	72,22%	40,00%	55,39
		Persentase lahan masyarakat yang berstatus legal	Persentase	80,00%	57,80%	72,25
		Persentase ketersediaan database lahan aset Pemko Batam	Persentase	100,00%	100,00%	100,00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pemanfaatan tanah dan ketersediaan lahan aset di Kota Batam	Persentase ketersediaan lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana pemerintah daerah	Persentase	72,00%	72,00%	100,00

<u>Program</u>	<u>Pagu</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Program Penataan Tata Guna Tanah	Rp.1.305.002.800,00	Rp.64.841.320,00	5,12%
	Rp.1.305.002.800,00	Rp. 64.841.320,00	5,12%



Batam, 30 Desember 2020
KABID PEMANFAATAN DAN
PENGADAAN TANAH


WAHYU DARYATIN, ST
NIP. 19750806 200212 1 006



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KEPALA BIDANG PENGAWASAN PERTANAHAN DAN
PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan dan sengketa lahan	Persentase pengaduan masalah lahan yang ditindaklanjuti	Persentase	100,00%	100,00%	100,00
		Persentase sengketa lahan yang mampu diselesaikan pada tahap mediasi	Persentase	100,00%	100,00%	100,00

Program

Pagu

Realisasi

%

1. -

-

-

-

-

-

-

Batam, 30 Desember 2020

**KABID PENGAWASAN PERTANAHAN
DAN PENANGANAN MASALAH
PERTANAHAN**

DAHERMIWATI B, SE
NIP. 19800501 200003 2 002

**KEPALA DINAS PERTANAHAN
KOTA BATAM**

NUZZALIE, AP. S.Sos
NIP. 19730206 199311 1 001



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KASUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum	Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatausahaan surat menyurat	Surat	300	300	100,00
		Melaksanakan pengumpulan data kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala dan mutasi	Usulan	14	14	100,00
		Melaksanakan pengumpulan data kepegawaian meliputi cuti pegawai dan yang purna tugas/pensiun	Berkas	27	27	100,00
		Melaksanakan evaluasi terhadap pegawai yang meliputi absensi dan disiplin pegawai	Surat	4	4	100,00
		Melaksanakan pengumpulan data kepegawaian tenaga harian lepas	Berkas	1	1	100,00
		Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah	Kali	12	12	100,00
		Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dan Sekretaris	Kali	12	12	100,00

Program

Pagu

Realisasi

%

1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur

Rp. 37.866.028,74 Rp. 37.858.528,00 99,98%

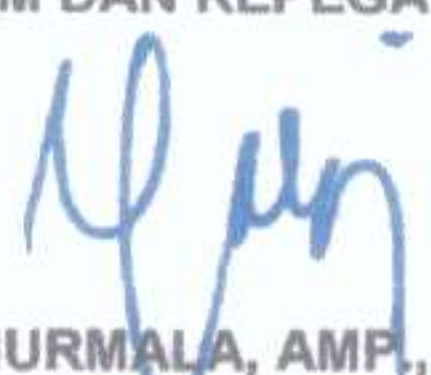
Rp. 37.866.028,74 Rp. 37.858.528,00 99,98%

SEKRETARIS DINAS


ISMIT ISMAIL, SIP., M.Si
NIP. 19680510 198810 1 001

Batam, 30 Desember 2020

**KASUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN**


NURMALA, AMP., SE
NIP. 19650815 198603 2 024



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KASUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Penyusunan Perencanaan	Dokumen Renja	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Dokumen Reviu Renja	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Dokumen IKU	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Dokumen Perjanjian Kinerja	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Dokumen RKA	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Dokumen DPA	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Dokumen RKA Perubahan	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Dokumen DPA Perubahan	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Dokumen LKjIP	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Dokumen LKPJ	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Dokumen LPPD	Persentase	100,00	100,00	100,00
		Dokumen Laporan Bulanan (RFK dan TEPR)	Persentase	100,00	100,00	100,00
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keuangan internal di dinas	Memproses pembayaran gaji pegawai	Kali	12	12	100,00
		Melakukan verifikasi kelengkapan bukti-bukti administrasi keuangan	Kali	12	12	100,00
		Menyusun Rencana usulan Kebutuhan Anggaran Keuangan	Kali	2	2	100,00
		Memproses dan memverifikasi Pengajuan SPM Dinas	Kali	24	24	100,00
		Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	Dokumen	12	9	100,00
		Jumlah laporan temuan hasil pemeriksaan internal / eksternal yang ditindaklanjuti	Dokumen	1	1	100,00

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
3	Meningkatnya tertib penatausahaan pengelolaan aset daerah	Persentase Aset dan Barang Milik Daerah Terinventarisasi Sudah Terdokumentasi Dengan Baik	Persentase	100,00	100,00	100,00

Program

Pagu

Realisasi

%

-

-

-

-

-

-

-

SEKRETARIS DINAS

ISMIT ISMAIL, SIP., M.Si
NIP. 19680510 198810 1 001

Batam, 30 Desember 2020

KASUB BAGIAN
PROGRAM DAN KEUANGAN

TANTI YUSKA, S.Hut., MT.
NIP. 19720220 199503 2 002



**PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KASI PENATAGUNAAN TANAH**

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya ketersediaan data penggunaan dan peruntukan tanah	Koordinasi dalam rangka penyusunan rencana tata ruang, rencana zonasi, dan rencana detil serta kegiatan penataan ruang secara menyeluruh di Kota Batam (lokasi Kampung Tua)	Kali	2	2	100.00

Program

Pagu

Realisasi

%

-

-

-

-

-

-

-

**KABID PENATAGUNAAN
DAN PENDAYAGUNAAN TANAH**

**AZHARI, SE
NIP. 19630302 198603 1 031**

Batam, 30 Desember 2020

KASI PENATAGUNAAN TANAH

**RESMAYETI, ST
NIP. 19800911 200212 2 003**



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KASI PENDAYAGUNAAN TANAH

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi tanah kosong dan terlantar di Kota Batam	Data dan informasi lahan kosong dan terlantar di Kota Batam (lokasi Kampung Tua)	Dokumen	1	1	100,00

Program

Pagu

Realisasi

%

-

-

-

-

-

-

-

**KABID PENATAGUNAAN
DAN PENDAYAGUNAAN TANAH**

AZHARI, SE
NIP. 19630302 198603 1 031

Batam, 30 Desember 2020

KASI PENDAYAGUNAAN TANAH

RIDWAN, SE
NIP. 19630304 1985031 021



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KASI PENATAAN KAWASAN TERTENTU

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Optimalisasi penataan kampung tua Kota Batam	Jumlah penataan lahan kampung tua	Kampung	10	4	40.00
		Koordinasi dalam rangka penataan kawasan kampung tua	Kampung	10	10	100.00

Program

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pagu

Realisasi

%

Rp. 501.110.743,00 Rp. 363.156.015,00 72,47%

Rp. 510.110.743,00 Rp. 363.156.015,00 72,47%

Batam, 30 Desember 2020

**KABID PENATAGUNAAN
DAN PENDAYAGUNAAN TANAH**

AZHARI, SE
NIP. 19630302 198603 1 031

KASI PENATAAN KAWASAN TERTENTU

EKI NILA KRISNA, SP
NIP. 19780301 200312 2 011



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KASI PEMANFAATAN TANAH

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pemanfaatan tanah dan ketersediaan database lahan aset di Kota Batam	Persentase ketersediaan database lahan aset Pemko Batam	Persentase	100,00	100,00	100,00

Program

Pagu

Realisasi

%

-

-

-

-

Batam, 30 Desember 2020

KASI PEMANFAATAN TANAH

ARMEN SYAMSU, ST
NIP. 19701026 200312 1 001

**KABID PEMANFAATAN
DAN PENGADAAN TANAH**

WAHYU DARYATIN, ST
NIP. 19750806 200212 1 006



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KASI PENGADAAN TANAH

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya ketersediaan lahan aset Pemko Batam	Tersedianya lahan aset Pemko Batam	Persil	13	13	100.00
2	Kejelasan status lahan aset Pemko Batam	Jumlah dokumen sertifikasi lahan aset Pemko Batam	Sertifikat	247	44	17,81
		Jumlah sertifikat lahan masyarakat	Sertifikat	243	89	36,63

Program

Pagu

Realisasi

%

KABID PEMANFAATAN
DAN PENGADAAN TANAH

WAHYU DARYATIN, ST
NIP. 19750806 200212 1 006

Batam, 30 Desember 2020

KASI PENGADAAN TANAH

BONGIS SIHOMBING
NIP. 19621007 198303 1 019



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KASI SURVEY PENGUKURAN DAN PEMETAAN TANAH

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Terlaksananya survey, pengukuran dan pemetaan tanah	Survey dan inventarisasi kebutuhan pengadaan dokumen tanah	Kali	6	6	100.00
		Survey, pengukuran, pemetaan aset Pemko Batam termasuk PSU untuk kebutuhan pembangunan	Kali	100	100	100.00
		Survey, pengukuran dan pemetaan pemanfaatan ruang	Kali	1	1	100.00

<u>Program</u>	<u>Pagu</u>	<u>Realisasi</u>	<u>%</u>
1. Program Penataan Tata Guna Tanah			
- Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemko Batam	Rp. 652.902.800,00	17.190.200,00	2,63%
- Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat	Rp. 652.100.000,00	Rp. 49.651.120,00	7,61%
	<hr/> Rp.1.305.002.800,00	Rp. 66.841.320,00	5,12%

Batam, 30 Desember 2020

**KABID PEMANFAATAN
DAN PENGADAAN TANAH**

WAHYU DARYATIN, ST
NIP. 19750806 200212 1 006

**KASI SURVEY PENGUKURAN DAN
PEMETAAN TANAH**

REDHA FAJAR S, SE, M.Si
NIP. 19781208 200903 1 002



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KASI PENGAWASAN DAN EVALUASI PERTANAHAN

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya pengawasan penatagunaan, pendayagunaan, pemanfaatan dan pengadaan tanah	Data hasil pengawasan pemanfaatan ruang dan pengadaan tanah	Dokumen	1	1	100.00

Program

1. Program Penataan Tata Guna Tanah
 - Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua

Pagu

Realisasi

%

Rp. 331.114.200,00	Rp. 160.536.300,00	48,48%
<hr/>		
Rp. 331.114.200,00	Rp. 160.536.300,00	48,48%

Batam, 30 Desember 2020

**KABID PENGAWASAN
PERTANAHAN DAN PENANGANAN
MASALAH PERTANAHAN**

DAHHERMIWATI B, SE
NIP. 19800501 200003 2 002

**KASI PENGAWASAN DAN EVALUASI
PERTANAHAN**

NELLY DEWANTI, SE, M.Si
NIP. 19790807 200212 2 005



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IVTAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KASI PENANGANAN MASALAH PERTANAHAN

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam
Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Optimalisasi pembinaan, penyuluhan, dan fasilitasi penyelesaian sengketa tanah	Data dan informasi terkait pengaduan permasalahan tanah	Dokumen	1	1	100.00
		Jumlah mediasi dan fasilitasi dalam penyelesaian masalah tanah	Kali	2	2	100.00

Program

Pagu

Realisasi

%

-

-

-

-

Batam, 30 Desember 2020

**KABID PENGAWASAN
PERTANAHAN DAN PENANGANAN
MASALAH PERTANAHAN**


DAHERMIWATI B, SE
NIP. 19800501 200003 2 002

**KASI PENANGANAN MASALAH
PERTANAHAN**


AGUSTI HANDAYANI
NIP. 19690922 200212 2 003



PEMERINTAH KOTA BATAM
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2020
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
KASI DATA DAN INFORMASI PERTANAHAN

SKPD : Dinas Pertanahan Kota Batam

Tahun Anggaran : 2020

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Tersedianya data dan informasi pertanahan	Sistem informasi pertanahan dan pelayanan data pertanahan	1 kegiatan	1	1	100.00

Program

Pagu

Realisasi

%

-

-

-

-

-

-

-

**KABID PENGAWASAN
PERTANAHAN DAN PENANGANAN
MASALAH PERTANAHAN**


DAHERMIWATI B, SE
NIP. 19800501 200003 2 002

Batam, 30 Desember 2020
**KASI DATA DAN INFORMASI
MASALAH PERTANAHAN**


SRI EFINURSIH, S.Sos
NIP. 19680903 200003 2 003